RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH (DPMPTSP)

Jl. Cikditiro No. 29 Palu – Telp. (0451) 458714 Kode Pos 94111
Website : http://dpmptsp.sultengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah dapat terselesaikan.

Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan program kerja yang lebih maksimal tahun 2027 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang pendanaannya bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2027

Sangat disadari, bahwa Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna namun diharapkan tetap dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut di atas.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa Meridhoi semua karya kita sebagai wujud pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Palu, 29 Juli 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI , S. Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710423 200003 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel..... iv

Daftar Gambar ……...v

BABI PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud danTujuan.....5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN REVIEW

KINERJA PERANGKAT DAERAH.....8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD..8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD…….…… 16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD……..…20

2.4 Review terhadap Rencangan Awal RKPD.....26

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok Pikiran 39

2.6 Inovasi Layanan Kepada Masyarakat.....39

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 41

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 41

3.3 Arah Kebijakan PD.....44

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **35**

4.1 Program dan Kegiatan 2027 45

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **54**

5.1 Indikator Kinerja Utama PD 2027.....54

5.2 Indikator Kinerja Kunci PD 2027 55

BABV PENUTUP.....**57**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Bidang Urusan Berdasarkan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Target Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah s/d Triwulan IV Tahun 2025 9

Tabel 2.2 Rekapitulasi evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP dan pencapaian Renstra DPMPTSP periode 2025 17

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 27

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok Pikiran Tahun 2027 39

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2027 42

Tabel 3.2 Formulasi dan Metodologi Perhitungan Indikator Sasaran Perangkat Daerah DPMPTSP 43

Tabel 4.1Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2027 46

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama PD Tahun 2027.....54

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci PD Tahun 2027 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja DPMPTSP Tahun Anggaran 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, serta Rencana Strategis Renstra DPMPTSP periode Tahun 2025 – 2029, dari segi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta pagu anggaran. Untuk Nomenklatur program kegiatan, seluruhnya mengacu pada RKPD Tahun 2027 dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Terakhir Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis antara lain :

1. Menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
3. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan.
4. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Perangkat Daerah (PD) pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun,

mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

Adapun program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renja PD tersebut disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pendanaan dan pagu indikatif serta urusan wajib atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

Rencana Kerja Tahun 2027 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Dimana Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029. Dalam penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2027, telah dilakukan analisa dan evaluasi capaian pada Tahun 2025 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah adalah landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan landasan operasional sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasionasl (RPJPN) 2025 - 2045
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penananaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Terakhir Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2025– 2029;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

- Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur No 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025 – 2029;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 800/1.11.1/938/PROG/DPMPTSP Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program kerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu satu tahun sesuai tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan.

Tujuan : Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 adalah:

- Sebagai pedoman dan landasan bagi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan program pembagunan khususnya bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Sebagai dasar untuk evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kegiatan dalam pencapaian target dan sasaran.
- Sebagai dasar untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan program yang disusun.
- Sebagai sarana untuk melaksanakan keterpaduan pelaksanaan program dengan unit kerja lainnya melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Sebagai tolok ukur bagi aparat pengawasan dalam mengevaluasi dan menilai kinerja unit kerja yang bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penyusunan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKASANAAN RENJA DAN REVIEW KINERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

Memuat kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, serta pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat evaluasi hasil kerja PD dalam menjalankan tugas, fungsi dan pelayanan berdasarkan Renstra dan Renja PD

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD serta rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok Pikiran

Memuat Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

2.6 Inovasi Layanan Kepada Masyarakat

Memuat Inovasi Bidang Urusan dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat hasil telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas program nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berisi hasil perumusan atas tujuan dan sasaran Renja OPD yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Arah dan Kebijakan PD

Memuat Arah dan Kebijakan PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

4.1 Program dan Kegiatan 2026

Berisi uraian mengenai rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, indikator kinerja, target kinerja serta lokasi dan kebutuhan dana indikatif.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN DAERAH

5.1 Indikator Kinerja Utama PD

Memuat Indikator Kinerja Utama PD

5.2 Indikator Kinerja Kunci PD

Memuat Indikator Kinerja Kunci PD

BAB VI PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN REVIEW KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 dan Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra PD :

Evaluasi hasil pelaksanaan Bidang Urusan Penanaman Modal Berdasarkan Renja dan Renstra sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Bidang Urusan Berdasarkan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Target Renstra
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
s/d Triwulan IV Tahun 2025

Kode	Urusan/ bidang urusan Pemerintahan Daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2025 (n-2)			Target program dan KegiatanTahun 2025 (Renja SKPD Tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan 2025 (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahunberjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=5+7+10	12=11/4
BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL											
2 1 8 0 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Reformasi Birokrasi DPMPTSP**	**70**	**225**	**64**	**151**	**151**	**68**	**66**	**97%**	**216%**
2 1 8 0 1 1 0 1	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP DPMPTSP**	**88**	**167**	**82**	**167**	**167**	**86**	**83**	**97%**	**189%**
2 1 8 0 1 1 0 1 0 0 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3	**11**	3	9	9	5	8	160%	298%
2 1 8 0 1 1 0 1 0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3	1	3	3	3	3	100%	289%
2 1 8 0 1 1 0 1 0 0 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	2	2	1	1	100%	185%
2 1 8 0 1 1 0 2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Anggaran**	**1**	**2**		**1**	**1**	**100%**	**145%**	**145%**	**101%**
2 1 8 0 1 1 0 2 0 0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	63	70/14	63	63	97	382	394%	88%
2 1 8 0 1 1 0 2 0 0 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	2	1	1	1	1	1	100%	100%
2 1 8 0 1 1 0 2 0 0 0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1	1	1	250	492	197%	100%
2 1 8 0 1 1 0 2 0 0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3	1	1	1	1	1	100%	100%
2 1 8 0 1 1 0 2 0 0 0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	3	18	37	37	1	1	100%	205%

Lanjutan Tabel 2.1

Kode	Urusan/ bidang urusan Pemerintahan Daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2025 (n-2)			Target program dan KegiatanTahun 2025 (Renja SKPD Tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan 2025 (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahunberjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=5+7+10	12=11/4
2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	78	1	3	3	18	18	100%	297%
2.18.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1**	**4**	**1**	**3**	**3**	**3**	**1**	**33%**	**297%**
2.18.01.1.02.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4	1	3	3	8	10	125%	294%
2.18.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan Dan Kepegawaian**	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**	**1**	**2**	**200%**	**150%**
2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	3	1	3	3	1	7	700%	299%
2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210	826	1	547	547	185	210	114%	0%
2.18.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**1**	**177,06**	**17706%**	**196%**
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4	1	3	3	1	1	100%	299%
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	3	1	3	3	1	1	100%	294%
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	4	1	3	3	1	1	100%	296%

Lanjutan Tabel 2.1

Kode	Urusan/ bidang urusan Pemerintahan Daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2025 (n-2)			Target program dan KegiatanTahun 2025 (Renja SKPD Tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan 2025 (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahunberjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=5+7+10	12=11/4
2 1 8 0 1 1 0 7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1**	**4**	**1**	3	3	**1**	**85**	**8500%**	**299%**
2 1 8 0 1 1 0 7 0 0 0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	26	1	5	5	40	3	8%	89%
2 1 8 0 1 1 0 7 0 0 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6	86	5	17	17	10	0	0%	20%
2 1 8 0 1 1 0 8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**3**	**21**	**67**	**67**	**1**	**98**	**9800%**	**5%**
2 1 8 0 1 1 0 8 0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	3	1	3	3	1	1	100%	297%
2 1 8 0 1 1 0 8 0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	3	1	3	3	1	1	100%	298%
2 1 8 0 1 1 0 9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**3**	**1**	3	3	**1**	3	**300%**	**297%**
2 1 8 0 1 1 0 9 0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	48	178	1	3	3	79	45	57%	299%
2 1 8 0 1 1 0 9 0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190	689	26	100	100	65	77	118%	208%
2 1 8 0 1 1 0 9 0 0 1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	15	148	385	385	3	3	100%	203%
2 1 8 0 2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang Tersedia**						**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Lanjutan Tabel 2.1

Kode	Urusan/ bidang urusan Pemerintahan Daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2025 (n-2)			Target program dan KegiatanTahun 2025 (Renja SKPD Tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan 2025 (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahunberjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=5+7+10	12=11/4
		Persentase Permintaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti sesuai kemampuan						**90%**	**95%**	**105%**	**105%**
2 1 8 0 2 1 0 1	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen/Laporan Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha**	**1**	**3**	**92**	**91**	**91**	**1**	**3**	**300%**	**96%**
2 1 8 0 2 1 0 1 0 0 0 1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	3	**1**	3	3	1	1	100%	295%
2 1 8 0 2 1 0 1 0 0 0 3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			1	3	3	1	2	200%	100%
2 1 8 0 2 1 0 1 0 0 0 4	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1	3	1	2	2	1	1	100%	194%
2 1 8 0 2 1 0 2	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**Jumlah Dokumen Pengembangan Peta Potensi Investasi Daerah Berbasis Spasial**	**1**	**3**	**2**	3	3	**1**	**2**	**200%**	299%
2 1 8 0 2 1 0 2 0 0 0 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1	3	1	3	3	1	1	100%	299%
2 1 8 0 2 1 0 2 0 0 0 5	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1	3	1	3	3	1	1	100%	300%

Lanjutan Tabel 2.1

Kode	Urusan/ bidang urusan Pemerintahan Daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2025 (n-2)			Target program dan KegiatanTahun 2025 (Renja SKPD Tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan 2025 (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahunberjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=5+7+10	12=11/4
2 1 8 0 3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi**						**100%**	**312%**	**312%**	**312%**
2 1 8 0 3 1 0 1	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**1**	3	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**200%**	**198%**
2 1 8 0 3 1 0 1 0 0 0 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1	3	1	3	3	1	1	100%	298%
2 1 8 0 3 1 0 1 0 0 0 3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1	3	1	3	3	1	2	200%	294%
2 1 8 0 5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA/PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal**						**55%**	**82%**	**149%**	**149,0%**
2 1 8 0 5 1 0 1	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan Realisasi Investasi PMA/PMDN, Laporan jumlah serapan tenaga kerja serta Laporan monitoring terhadap perusahaan pengguna fasilitas penanaman modal**	**1**	5	3	3	3	**1**	**0**	**0%**	**292%**
2 1 8 0 5 1 0 1 0 0 0 4	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	3	411	17	350	350	3	12	400%	11662%
2 1 8 0 5 1 0 1 0 0 0 5	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	4	37	12	10	10	6	20	333%	247%

Lanjutan Tabel 2.1

Kode	Urusan/ bidang urusan Pemerintahan Daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2025 (n-2)			Target program dan KegiatanTahun 2025 (Renja SKPD Tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan 2025 (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahunberjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=5+7+10	12=11/4
2.18.05.1.01.0.00.06	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1	2.495	378	642	642	420	240	57%	64198%
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**						**92%**	**96%**	**104%**	**104,00%**
2.18.06.1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola, dianalisis dan dimutakhirkan dalam sistem informasi potensi investasi daerah**	**1**	**5**	**3**	**3**	**3**	**4**	**3**	**75%**	**298%**
2.18.06.1.01.0.00.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	5	3	3	3	4	3	75%	298%
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Hasil Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan**						**90%**	**90%**	**100%**	**100%**
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan						**93%**	**97%**	**104%**	**104%**

Lanjutan Tabel 2.1

Kode	Urusan/ bidang urusan Pemerintahan Daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2025 (n-2)			Target program dan KegiatanTahun 2025 (Renja SKPD Tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan 2025 (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahunberjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=5+7+10	12=11/4
2 1 8 0 4 1 0 1	**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan atau Dokumen Layanan Pengaduan dan Informasi, Pengembangan Standar Layanan Perizinan dan Inovasi Layanan,SP DAN SOP Serta IKM**	**1**	**6**	**2**	**7**	**7**	**1**	**2**	**200%**	**49%**
2 1 8 0 6 1 0 1 0 0 0 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	585	22783	2200	24677	24677	1324	1444	109%	4218%
2 1 8 0 6 1 0 1 0 0 0 7	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	585	65901	300	126	126	2200	943	43%	2519%
2 1 8 0 6 1 0 1 0 0 0 8	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5	896	**2**	3	3	6	272	4533%	47%
2 1 8 0 4 1 0 2	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah dokumen/laporan perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan, layanan perizinan dan non-perizinan berbasis IT serta penyelenggaraan PTSP**	**1**	**4**	**1**	**8640**	**8640**	**1**	**1**	**100%**	**319%**
2 1 8 0 6 1 0 2 0 0 0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	271	8640	2200	19558	19558	1	1	100%	3343%

Dari tabel diatas untuk kinerja Tahun 2025 dari 6 program yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dapat tercapai secara keseluruhan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Terakhir Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi, Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada Tahun 2025 terdapat 6 (enam) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan yang dilaksanakan dan semuanya dapat memenuhi target yang direncanakan. Faktor pendukung tercapainya target yang direncanakan diantaranya yaitu anggaran yang tersedia mampu dimaksimalkan pemanfaatannya, jumlah SDM yang memadai serta efisiensi penggunaan waktu yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun target kinerja pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional:
   PMDN/PMDN (Juta Rp.) : Rp. 140.000.000,-
2. Jumlah Investor Berskala Nasional:
   PMA/PMDN (Proyek) : 2.750 Proyek
3. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi:
   PMDN (Milyar Rupiah) : 4.600
4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja:
   (Orang /Perusahaan) : 51

Pencapaian target kinerja program prioritas pada tahun 2025 yaitu:

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional:
   PMDN/PMDN (Rp.) : Rp. 127.209.764.000.000 ,-
2. Jumlah Investor Berskala Nasional:
   PMA/PMDN (Proyek) : 2.700 Proyek
3. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi:
   PMDN (Milyar Rupiah) : 7.992
4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja:
   (Orang /Perusahaan) : 18

Rekapitulasi evaluasi kinerja pada hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP dan pencapaian Renstra DPMPTSP s/d akhir periode Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2. dibawah ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP dan pencapaian Renstra DPMPTSP periode 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatkan Nilain Investasi Yang berkualitas	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	2750	2700	98%
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp Juta	140.000.000	127.209.764	91%
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	4,600	7.992	174%
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	Orang/Perusahaan	51	18	35%

Untuk Tahun 2025, Total realisasi investasi yang diraih Sulawesi Tengah adalah 127,2T dari target 140T atau tercapai 91%, dimana dari angka tersebut 7,9T merupakan realisasi yang berasal dari PMDN yang merupakan kewenangan Provinsi dengan capaian 174% dari target 4,6T. Dengan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Indonesia 18 Orang/Perusahaan atau hanya tercapai 35% dari target 51 Orang/Perusahaan dengan rincian 31.271 Orang Tenaga Kerja Indonesia yang tersebar pada 1.746 Perusahaan. Sementara pertumbuhan pada proyek baru yang masuk sebanyak 2.700 Proyek atau tercapai 98% dari target 2.750 Proyek Non UMK.

Dari data tersebut diketahui bahwa Capaian realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 belum dapat terealisasi dikerenakan beberapa faktor penghambat yaitu: Guncangan Finansial Investor Global: Kebangkrutan atau masalah finansial pada induk perusahaan di negara asal (contoh: kasus Jiangsu Delong di Tiongkok) menciptakan risiko operasional besar pada unit di daerah, termasuk ancaman terhadap keberlanjutan PT GNI, Oversupply & Koreksi Harga: Surplus nikel global sebesar 209.000 ton menyebabkan harga nikel tertekan (CNBC Indonesia), memicu sikap wait and see investor untuk ekspansi lini produksi baru, Kepatuhan ESG dan Sanksi Lingkungan: Sanksi dari KLHK terhadap beberapa perusahaan di Morowali terkait pelanggaran aturan lingkungan hidup (Antara News) menciptakan sentimen negatif di pasar modal global serta Transisi Regulasi: Implementasi PP No. 28 Tahun 2025 membawa perubahan fundamental pada sistem OSS RBA, yang pada fase awal menyebabkan pelambatan administrasi perizinan teknis (Media Justitia).

Meskipun tidak mencapai target investasi baik yang ditetapkan daerah maupun BKPM tapi secara nasional capaian Tahun 2025 tersebut menempatkan Sulawesi Tengah masuk dalam jajaran **5 (lima) besar** raihan Realisasi Investasi sebesar 127,2T atau menyumbang 6,6% terhadap perolehan Realisasi Investasi Nasional. Dan dari sisi Penanaman Modal Asing

(PMA), Sulawesi Tengah menempati **Peringkat ke-2 (dua)** dengan capaian USD 7,4M atau menyumbang 13,2% dari total capaian PMA Nasional. Sementara dari Sektor Hilirisasi, Sulawesi Tengah menempati **Peringkat Pertama** dari Top 5 Lokasi Hilirisasi dengan capaian 110T. Hal ini berdasarkan *Press Release* Menteri Investasi dan Hilirisasi /Kepala BKPM RI pada 15 Januari 2026 di Jakarta.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

NO	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	IKK	TARGET RENSTRA DPMPTSP 2025-2029					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2025	TRIWULAN II 2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	INDIKATOR TUJUAN	√												
	Nilai Investasi				140.000.000	140.100.000	140.200.000	140.300.000	140.400.000	127.209.764	68.695.811	96.237.250	98.584.500	
2	INDIKATOR SASARAN		√											
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Juta Rp)				140.000.000	140.100.000	140.200.000	140.300.000	140.400.000	127.209.764	68.695.811	96.237.250	98.584.500	
	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) (proyek)				2.750	2.770	2.790	2.810	2.830	2.700	990	1.520	1.540	
	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar rupiah)				4.600	4.610	4.620	4.630	4.640	7.992	3.962	4.155	4.197	
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (orang/perusahaan)				51	52	53	54	55	18	9	17	18	
3	INDIKATOR IKK			√										
	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Traget Investasi (%)				100	100	100	100	100	91	49	100	100	

Dari tabel 2.3 di atas menunjukkan terdapat penurunan proyeksi target capaian Tahun 2027 dan 2028, hal ini disebabkan karena mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi terkini dunia investasi di Indonesia dan kondisi stock investasi di Sulawesi Tengah, serta mempertimbangkan juga estimasi prognosis target dari BKPM. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi penyesuaian target antara lain :

- Perubahan Regulasi; Moratorium pada PP 28 tahun 2025 secara resmi mengatur pengetatan dan penghentian sementara investasi smelter nikel baru untuk produk antara, seperti Nickel Pig Iron (NPI), Feronickel (FENI), Nickel Matte, dan Mixed HydroxidePrecipitate (MHP), dimana Investasi Sulawesi tengah masih sangat bertumpu pada produk nikel tersebut;

- Faktor Geopolitik Global; Konflik Timur Tengah (seperti ketegangan antara Iran, AS, dasn Israel), perang yang terus berlanjut, dan persaingan dagang AS – Tiongkok adalah faktor geopolitik utama. Hal ini memicu ketidakpastian tinggi, gangguan rantai pasok global, lonjakan inflasi, dan fluktuasi harga komoditas /energy, yang membuat investor lebih berhati – hati atau menunda realisasi investasi.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

A. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan non pelayanan dasar, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur No 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah



Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah lebih jelasnya di uraikan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris membawahi:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Strukturnya dapat dijabarkan Sebagai Berikut :

1. Sekretariat, terdiri atas:
   - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
   - Tim Program
   - Tim Keuangan dan Asset
2. Tim Teknis Penanaman Modal dan Perizinan, terdiri atas:
   - Tim Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   - Tim Promosi Penanaman Modal
   - Tim Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman

Modal

- Tim Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
- Tim Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
- Tim Penyelenggara Layanan Konsultasi dan Fasilitasi Penanganan Pengaduan Perizinan.

Selanjutnya Uraian Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur No 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

(2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengolahan data dan informasi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

II. Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi perencanaan program, keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;

d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana program, rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan perencananan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;

2. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan Menyusun rencana kerja Tim Bagian Kepegawaian dan Umum;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;

c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;

e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;

f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;

g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;

h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;

i. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;

j. melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan tim bidang kepegawaian dan umum;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan

n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan tim Bagian Kepegawaian dan Umum.

III. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.

B. Isu-Isu Strategis

Isu-isu penting yang menjadi perhatian pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur penanaman modal dan pelayanan perizinan, serta optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan;
2. Perbaikan iklim investasi yang kondusif dan lebih menarik pada sektor sektor non ekstraktif dengan skema ekonomi kerakyatan;
3. Peningkatan promosi potensi daerah yang akan difokuskan pada pengembangan IPRO sesuai petunjuk dan aturan dari BKPM RI;
4. Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang efektif dan efisien;
6. Perlunya diversifikasi dan perluasan arah investasi ke sektor pertanian dan perkebunan untuk mengakomodir penyerapan tenaga kerja lokal sesuai dengan Visi Gubernur Sulawesi Tengah.

Dalam perjalanan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah masih terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi, diantaranya sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya aparatur DPMPTSP belum seluruhnya memadai;
2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum optimal;
3. Belum maksimalnya dukungan penganggaran pada pengembangan IPRO yang akan menjadi satu-satunya instrumen Promosi Penanaman Modal sesuai petunjuk dan aturan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM RI;
4. Sebagian Kabupaten/Kota tata ruangnya belum dilegal formalkan sehingga peruntukan lahan di sejumlah wilayah menjadi tumpang tindih dan mempengaruhi investasi di daerah, sementara aturan

perizinan pada PP 28 Tahun 2015 mewajibkan penggunaan peta Poligon yang terkoneksi dengan dokumen Tata Ruang Daerah;

5. Sebagian Kabupaten/Kota belum menyusun Rencana Umum Penanaman Modal, yang merupakan dokumen perencanaan strategis di bidang penanaman modal;
6. Sebagian Kabupaten/Kota untuk Regulasi kemudahan investasi daerah belum seluruhnya tersedia;
7. Ketidaksesuaian antara tingginya realisasi investasi yang didominasi sektor pertambangan beserta turunannya dengan ketersediaan latar belakang pendidikan tenaga kerja, sehingga investasi yang masuk belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan penyerapan tenaga kerja di daerah secara maksimal.

Upaya Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal dan Perizinan di Sulawesi Tengah, antara lain :

1. Pembaruan regulasi daerah turunan dari PP 28 Tahun 2025;
2. Optimalisasi Promosi investasi melalui pengembangan IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) yang dapat menggaet minat calon investor potensial;
3. Mengarahkan dan menggiatkan promosi penanaman modal pada sektor-sektor strategis padat karya, khususnya pertanian dan perkebunan, agar tercipta lapangan kerja yang selaras dengan kapasitas ketersediaan tenaga kerja lokal di daerah.
4. Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui pendampingan penerbitan NIB baik di ruang pelayanan maupun ruang-ruang publik yang memungkinkan lainnya;
5. Peningkatan koordinasi dalam fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dengan instansi vertikal maupun horisontal yang memiliki kewenangan dalam izin tertentu dan mengoptimalkan pendampingan pengisian LKPM bagi PMA/ PMDN baik secara langsung/Daring atau tidak langsung/Online;
6. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi OSS dan LKPM bagi pelaku usaha;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027, dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS					
PROGRAM		LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM		LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10
					17.707.639.971,27						**16.704.083.357,05**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66	**14.687.639.971,27**	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66	**15.790.179.439,05**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP DPMPTSP	74,5	**410.987.755**	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP DPMPTSP	74,5	**32.214.150**
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	259.818.555	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	20.905.550
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Laporan	49.918.500	b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7 Laporan	5.488.300
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	51.250.700	c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.488.300
d	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	27 Data	25.000.000	d	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	27 Data	83.000
e	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	25.000.000	e	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	249.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	94%	**12.233.826.469,27**	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	94%	**15.046.469.326,05**

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 (Lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS					
PROGRAM			LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM			LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1			2	3	4	5	6			7	8	9	10
a		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan	10.968.641.919,87	a		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan	14.884.019.326,05
b		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.022.644.049,27	b		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	1 Dokumen	136.450.000,00
c		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	45.000.000	c		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	5.000.000
d		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	80.000.000	d		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000
e		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	72.540.500,13	e		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.500.000,00
f		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	45.000.000	f		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	18 Laporan	5.500.000
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1 Laporan**	**90.825.800**	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1 Laporan**	**15.000.000**
a		Penyusunan Perencanaaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	**21.126.050**	a		Penyusunan Perencanaaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 (Lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS						
PROGRAM			LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM			LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1			2	3	4	5	6			7	8	9	10
	b	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	42.875.600	b	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	5.000.000
	c	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	26.824.150	c	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian**	5 Dokumen	**152.169.650**	4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian**	3 Dokumen	**9.598.800**
	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	77.200.150	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-
	b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	29.969.500	b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	4.637.500
	c.	Monitoring,.Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	c.	Monitoring,.Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	461.300
	d.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210 Orang	30.000.000	d.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-
	e.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undngan	50 Orang	10.000.000	e.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undngan	50 Orang	4.500.000

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 (Lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS					
PROGRAM			LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM		LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1			2	3	4	5	6		7	8	9	10
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI, Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah, Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	Nilai 88 ZI, 3,5 Nilai SPBE, 75 Nilai Kualitas Kearsipan Digital	366.138.450	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI, Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah, Nilai Kualitas Pengelolaan	Nilai 88 ZI, 3,5 Nilai SPBE, 75 Nilai Kualitas Kearsipan Digital	28.766.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	28.757.950	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	1 Paket	60.000.000	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	-	-
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	102.680.500	c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	160.700.000	d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	19.620.000
e.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	7.000.000	e.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.250.000
f.	Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.000.000	f.	Dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	6.896.000

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 (Lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS					
PROGRAM		LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM		LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Niali Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada SPSE,	85 Nilai	271.177.800	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Niali Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada SPSE	85 Nilai SPBE	350.000
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang	-	-
b	Pengadaan Mebel	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Paket	120.950.000	b	Pengadaan Mebel	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	90.227.800	c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	-
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10.000.000	d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	350.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	97,5 Nilai	772.033.447	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	97,5 Nilai	545.946.163
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	433.662.261	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	393.000.183

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 (Lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS					
PROGRAM			LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM			LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1			2	3	4	5	6			7	8	9	10
b		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	338.371.186	b		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	152.945.980
8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	4 Laporan	**390.480.600**	8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	3 Laporan	**111.835.000**
a		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	79 Unit	192.930.000	a		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	79 Unit	56.500.000
b		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	65 Unit	76.580.000	b		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	65 Unit	26.535.000
c		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	20.000.000	c		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-
d		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.970.600	d		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	28.800.000

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 (Lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS					
PROGRAM			LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM			LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1			2	3	4	5	6			7	8	9	10
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			- Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang tersedia - Persentase Permintaan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan Ketentuan	100%, 90%	500.000.000	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			- Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang tersedia -Persentase Permintaan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan Ketentuan	100%, 90%	139.999.800
	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Regulasi dan Fasilitasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	132.547.500	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Regulasi dan Fasilitasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	34.055.800
	a	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	36.450.400	a	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	34.055.800
	b	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	50.000.000	b	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	-
	c	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Dokumen	46.097.100	c	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	-

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 (Lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2027					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS				
PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Peluang Investasi	3 Dokumen	367.452.500	2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Peluang Investasi	2 Dokumen	105.944.000
a Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	100.656.400	a Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	35.530.000
b. Pemutakhiran Data Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daerah yang telah dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	13	20.000.000	b. Pemutakhiran Data Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daerah yang telah dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	-	-
c. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	246.796.100	c. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	70.414.000
3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	100%	630.000.000	3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	100%	141.847.278
1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Strategi dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi	2 Dokumen	630.000.000	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Strategi dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi	2 Dokumen	141.847.278
a Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen	544.427.250	a Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen	121.397.278

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 (Lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS					
PROGRAM			LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM		LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1			2	3	4	5	6		7	8	9	10
b		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	85.572.750	b	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	20.450.000
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA dan PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal	65%	690.000.000	4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA dan PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal	65%	160.555.950
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA yang Menyampaikan LKPM	1173 Pelaku Usaha	690.000.000	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA yang Menyampaikan LKPM	1173 Pelaku Usaha	160.555.950
a	Pengawasan Penanaman Modal		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	7 Kegiatan Usaha	211.793.500	a	Pengawasan Penanaman Modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan	7 Kegiatan Usaha	134.849.950
b	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan Usaha	114.552.750	b	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan Usaha	24.710.000

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 (Lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2027					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS				
PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	420 Pelaku Usaha	363.653.750	c Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan	120 Pelaku Usaha	996.000
5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**93%**	**400.000.000**	**5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	93%	**123.095.000**
1 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		**Jumlah Dokumen Data dan Informasi PMA dan PMDN**	**3 Dokumen**	**400.000.000**	**1 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**		**Jumlah Dokumen Data dan Informasi PMA dan PMDN**	3 Dokumen	**123.095.000**
a Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	400.000.000	a Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	123.095.000

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 (Lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2027					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS				
PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		- Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan - Persentase Hasil Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non perizinan	90%, 94%	800.000.000	6 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		- Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Persentase Hasil Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan	90%, 94%	348.405.890
1 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Fasilitasi Penanganan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	2 Dokumen	326.823.700	1 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Fasilitasi Penanganan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	2 Dokumen	218.906.190
a Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	1200 Kegiatan Uisaha	160.535.700	a Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	1200 Kegiatan Uisaha	113.905.990
b Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	166.288.000	b Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	40 Pelaku Usaha	105.000.200
2 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Koordinasi Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	2 Dokumen	473.176.300	2 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Koordinasi Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	1 Dokumen	129.499.700

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 (Lanjutan)

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS					
PROGRAM		LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM		LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	50.525.750	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	-	-
b	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1150 Pelaku Usaha	422.650.550	b	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1150 Pelaku Usaha	129.499.700

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok Pikiran

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok Pikiran Tahun 2027

No	USULAN PERMASALAHAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH USULAN	KETERANGAN	
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES
	NIHIL	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*

2.6 Inovasi Layanan Kepada Masyarakat

Inovasi layanan publik merupakan terobosan atau gagasan kreatif, baik yang baru maupun hasil modifikasi, yang bertujuan untuk membuat pelayanan pemerintah kepada Masyarakat menjadi lebih cepat mudah transparan dan efisien. Olehnya pada Tahun 2027 DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan pelaksanaan beberapa inovasi layanan antara lain:

1. Pengembangan Dashboard Interaktif Data Investasi (layanan yang memberikan kemudahan bagi Stakeholder maupun Pelaku Usaha dalam mengakses data perkembangan investasi di Sulawesi Tengah);
2. Pengembangan IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) yang berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanam modal (*investor needs*) sebagai instrumen utama Promosi Peluang Investasi Sulawesi Tengah. IPRO memuat ide project yang visioner dan inovatif, aspek pasar dan pemasaran, aspek legalitas dan perundangan, aspek manajemen dan organisasi, aspek teknik, aspek sustainability dan SDGs dan aspek keuangan. Dokumen IPRO juga berisikan pre-FS dan/atau FS termasuk hitungan bisnis dan nilai keekonomian project sehingga dokumen ini lengkap dan sangat layak ditawarkan kepada calon investor potensial dan dipromosikan saat misi investasi promosi;
3. Pelaksanaan Klinik Berani Investasi Langsung Berusaha di beberapa Kabupaten/Kota (mendukung ketercapaian Program Prioritas Gubernur Berani Harmoni 20.000 WUB). Inovasi ini merupakan layanan jemput bola terintegrasi terpadu melalui kolaborasi antar Lembaga DPMPTSP, Perbankan, BPJPH dan BPOM dalam 1 (satu) Hari 1 (satu) Tempat untuk mendukung pengembangan UMKM di daerah agar mampu naik kelas bermitra dengan usaha besar;
4. Pembuatan Katalog Halo-Vest Sektor Unggulan dan Peluang Investasi;
5. Layanan konsultasi dan pendampingan penerbitan izin serta layanan konsultasi perizinan jarak jauh via zoom sesuai permintaan. Memberikan kemudahan konsultasi terkait perizinan jarak jauh yang lebih terarah, kontekstual, dan demo OSS RBA secara langsung via *share screen*. Sehingga Pelaku Usaha/Pemohon Izin mendapatkan pemahaman yang jelas meski terkendala jarak;

6. Layanan Pengaduan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, merupakan fasilitas layanan bagi Masyarakat atau Pelaku Usaha untuk menyampaikan kendala, masalah atau dugaan pelanggaran terkait Sistem Perizinan Berbasis Resiko (OSS-RBA);
7. Layanan konsultasi dan pendampingan pelaporan LKPM bagi Pelaku Usaha.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Delapan program prioritas nasional dengan sebutan Asta Cita yang isi salah satunya adalah Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi. Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (prioritas 5), yang penjelasannya antara lain adalah melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kompetensi aparatur. Sejalan dengan hal tersebut maka untuk membangun ***"Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif*****"** sebagaimana telah menjadi salah satu Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam RPJMD tahun 2025 - 2029, maka harus didukung dengan upaya-upaya kemudahan investasi dan peningkatan pelayanan perizinan yang berkualitas bagi para pelaku usaha sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat terwujud.

Seiring dengan uraian di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah (DPMPTSP) dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan dalam Rencana Strategis pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ada 3 (tiga) sub kegiatan yakni Pengawasan Penanaman Modal, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan usahanya, dan sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha guna mendukung tercapainya target Realisasi Investasi Tahun 2027.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Tujuan berisi target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun,satu tahun, semester, triwulan atau bulanan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencerminkan fenomena-fenomena yang ada, DPMPTSP merupakan bagian dari satuan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang sepenuhnya mendukung pemenuhan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang. Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam urusan penanaman modal yaitu:

Misi 2 **"Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan" .**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Sasaran dan Tujuan yang dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATORKINERJA	SATUAN	TARGET 2027
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)(Proyek)	Proyek	1520
			Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp Juta	96.237.250
			Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	4.155
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	Orang/Perusahaan	17

Penetapan target 2027 mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi terkini dunia investasi di Indonesia, serta mempertimbangkan juga estimasi prognosis target dari BKPM. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi penyesuaian target antara lain :

- Perubahan Regulasi; Moratorium pada PP 28 tahun 2025 secara resmi mengatur pengetatan dan penghentian sementara investasi smelter nikel baru untuk produk antara, seperti Nickel Pig Iron (NPI), Feronickel (FENI), Nickel Matte, dan Mixed HydroxidePrecipitate (MHP), dimana Investasi Sulawesi tengah masih sangat bertumpu pada produk nikel tersebut.

- Faktor Geopolitik Global; Konflik Timur Tengah (seperti ketegangan antara Iran, AS, dasn Israel), perang yang terus berlanjut, dan persaingan dagang AS – Tiongkok adalah faktor geopolitik utama. Hal ini memicu ketidakpastian tinggi, gangguan rantai pasok global, lonjakan inflasi, dan fluktuasi harga komoditas /energy, yang membuat investor lebih berhati – hati atau menunda realisasi investasi.

Sedangkan Formulasi dan Metodologi Perhitungan Indikator Sasaran dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Formulasi dan Metodologi Perhitungan
Indikator Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN)	FORMULA INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	METODOLOGI
1.	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	'-Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	Jumlah investor (proyek) berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan	Mengukur ketercapaian jumlah Investor (proyek) berskala Nasional PMDN/PMA di wilayah sulawesi Tengah	Jumlah investor (proyek) berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan yang direlease oleh Kementerian Investasi/BKPM secara periodik
		- Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Juta Rupiah)	Jumlah capaian nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan	Mengukur ketercapaian nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah	Jumlah capaian nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan yang direlease oleh Kementerian Investasi/BKPM secara periodik
		'- Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Jumlah capaian nilai realisasi investasi PMDN di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan	Mengukur pergerakan capaian nilai realisasi Investasi PMDMN di wilayah Sulawesi Tengah yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah capaian nilai realisasi investasi PMDN di wilayah Sulawesi Tengah tahun berjalan yang direlease oleh Kementerian Investasi/BKPM secara periodik
		'- Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DIBAGI Jumlah Perusahaan di Wilayah Sulawesi tengah	Mengukur capaian serapan Tenaga Kerja Indonesia dari kegiatan investasi di wilayah Sulawesi Tengah	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DIBAGI Jumlah Perusahaan di Wilayah Sulawesi tengah yang direlease oleh Kementerian Investasi/BKPM secara periodik

3.3 Arah Kebijakan DPMPTSP

Arah kebijakan pembangunan ekonomi khususnya di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur Pemerintah Daerah;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang terkait dengan urusan penanaman modal, utamanya meubeler, wifi, perangkat komputer dan lainnya;
3. Menciptakan iklim investasi kondusif yang berkelanjutan di daerah pada sektor-sektor non ekstraktif dengan skema ekonomi kerakyatan melalui penerbitan regulasi pendukung dimana kemitraan lebih ditekankan dalam persyaratan investasi;
4. Meningkatkan Promosi investasi melalui pengembangan IPRO (*Investment Project Ready to Offer*);
5. Akselerasi peningkatan jumlah realisasi investasi baik PMA maupun PMDN melalui Pengawasan Penanaman Modal di 13 Kabupaten/Kota dan monitoring pelaporan LKPM;
6. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT yang berorientasi pada kepuasan pelanggan;
7. Pengembangan data potensi unggulan daerah terutama untuk sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan 2027

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam Program dan Kegiatan yang disertai indikator kinerja baik Program maupun Kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Terdapat 6 (enam) Program, dan 15 (lima belas) Kegiatan dan 50 (lima puluh) Sub Kegiatan dalam Renja DPMPTSP Tahun 2027. 6 (enam) Program tersebut terdiri dari 1 (satu) Program rutin penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan 8 (delapan) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan. Selanjutnya 5 (lima) Program teknis dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai Program dan Kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah maupun luar daerah. Total kebutuhan dana untuk Tahun Anggaran 2027 berdasarkan RKPD Perubahan adalah sebesar Rp. 16.704.083.357.05 ,- dengan sumber dana APBD.

Penjabaran rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja serta Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 :

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Renja 2027 DPMPTSP

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								16.704.083.357,05							19.003.273.268,01	
	2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**		65,88	65,25	66	15.790.179.439,05					DPMPTSP	66,5 Indeks	15.533.273.268,01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP DPMPTSP**		83	74	74,5	32.214.150,00					DPMPTSP	75	489.037.142	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	10 Dokumen	10 Dokumen	20.905.550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAU			DPMPTSP	10 Dokumen	332.809.482	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinsi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	7 Laporan	7 Laporan	5.488.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	7 Laporan	52.414.425	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	2 Laporan	2 Laporan	5.488.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	2 Laporan	53.813.235	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	27 Data	27 Data	83.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	27 Data	25.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	249.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	25.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Anggaran**		93%	94%	94%	15.046.469.326,05					DPMPTSP	94%	12.785.102.480,01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		130 Orang/Bulan	130 Orang/Bulan	130 Orang/Bulan	14.884.019.326,05	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	DAU			DPMPTSP	130 Orang/Bulan	11.407.387.596,67	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	1 Dokumen	1 Dokumen	136.450.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	1.123.047.358,01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Renja 2027 DPMPTSP (Lanjutan)

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		250 Dokumen	200 Dokumen	100 Dokumen	5.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	200 Dokumen	47.250.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	1 Laporan	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Laporan	84.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1	1	1 Dokumen	5.500.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	76.167.525,33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		18	18	18 Laporan	5.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	18 Laporan	47.250.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**3**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**15.000.000**					**DPMPTSP**	**3 Laporan**	**95.367.090**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	22.182.352	
	2.18.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	1	11 Laporan	5.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	11 Laporan	45.019.380	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Laporan	28.165.358	
	2.18.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian**		**1**	**1**	**3 Dokumen**	**9.598.800**					**DPMPTSP**	**5 Dokumen**	**168.128.131**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Renja 2027 DPMPTSP (Lanjutan)

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Paket	89.410.156	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	7 Dokumen	7 Dokumen	4.637.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	7 Dokumen	30.717.975	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.05.0005	Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dokumen	1 Dokumen	461.300						1 Dokumen	6.000.000	
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		185	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	210 Orang	32.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			20 Orang	50 Orang	4.500.000						50 Orang	10.000.000	
	2.18.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI, Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah, Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah**			**Nilai 88 ZI, 3,5 Nilai SPBE, 75 Nilai Kualitas Kearsipan Digital**	**Nilai 88 ZI, 3,5 Nilai SPBE, 75 Nilai Kualitas Kearsipan Digital**	**28.766.000**					**DPMPTSP**	**Nilai 88 ZI, 3,5 Nilai SPBE, 75 Nilai Kualitas Kearsipan Digital**	**436.945.372**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Paket	30.195.847	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan			-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Paket	63.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Paket	106.164.525	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Renja 2027 DPMPTSP (Lanjutan)

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	1	1 Laporan	19.620.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Laporan	219.585.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000						1 Dokumen	9.000.000	
	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	6.896.000						1 Dokumen	9.000.000	
	2.18.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada SPSE,			85 Nilai	85 Nilai	350.000					DPMPTSP	85 Nilai	284.736.690	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan		1	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Unit	52.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		5	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	3 Paket	126.997.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		10	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	7 Unit	90.239.190	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	350.000						3 Unit	15.000.000	
	2.18.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi**		**1**	**97,5 Nilai**	**97,5 Nilai**	545.946.163					DPMPTSP	97,75 Nilai	863.951.733	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	1	1 Laporan	393.000.183	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Laporan	443.345.374	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	1	1 Laporan	152.945.980	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Laporan	420.606.359	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Renja 2027 DPMPTSP (Lanjutan)

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		1	3 Laporan	3 Laporan	111.835.000					DPMPTSP	4 Laporan	410.004.630	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		79	79	79 Unit	56.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU				79 Unit	202.576.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		65	65	65 Unit	26.535.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	65 Unit	80.409.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Unit	21.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	3	3 Unit	28.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	3 Unit	106.019.130	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**- Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang tersedia - Persentase Permintaan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan Ketentuan**		**100 dan 89%**	**100% dan 90%**	**100% dan 90%**	139.999.800					DPMPTSP	**100% dan 91%**	575.000.000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.02.1.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah Dokumen Regulasi dan Fasilitasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Serta Jumlah Dokumen Tatakelola Deregulasi Bidang Penanaman Modal		**2 Dok.**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	34.055.800						DPMPTSP	**2 Dokumen**	189.174.875	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1	1	1 Dokumen	34.055.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	88.272.920	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		2 Dokumen	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	2 Dokumen	52.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Renja 2027 DPMPTSP (Lanjutan)

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.1.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		1	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	48.401.955	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.02.1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	Jumlah Dokumen Perencanaan Peluang Investasi		2 Dok.	1 Dok.	2 Dok.	105.944.000					DPMPTSP	3 Dok.	385.825.125	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		1	1	1 Dokumen	35.530.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	105.689.220	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Rgional)	Jumlah Daerah yang Telah dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi			-	-	-						13 Data	21.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi		1	1	1 Dokumen	70.414.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1Dokumen	259.135.905	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi		100	100%	100%	141.847.278					DPMPTSP	100%	725.000.000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.03.1.01	**Penyelenggarsan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi**	Jumlah Dokumen Strategi dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	141.847.278					DPMPTSP	2 Dokumen	725.000.000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi		2	2	2 Dokumen	121.397.278	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	DAU			DPMPTSP	2 Dokumen	619.869.975	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		1	1	1 Dokumen	20.450.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	105.130.025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	- Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan -Persentase Hasil Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non perizinan		92% dan 89%	90% dan 93%	94% dan 90%	348.405.890					DPMPTSP	94% dan 90%	920.000.000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.04.1.01	**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Fasilitasi Penanganan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	218.906.190					DPMPTSP	2 Dokumen	356.237.833	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Renja 2027 DPMPTSP (Lanjutan)

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah		2200	1100	1200 Kegiatan Usaha	113.905.990	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1300 Kegiatan Usaha	174.983.913	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		29	35	40 Pelaku Usaha	105.000.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	45 Pelaku Usaha	181.253.920	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.04.1.02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Koordinasi Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah**		**2**	**1**	**1 Dokumen**	**129.499.700**					**DPMPTSP**	**2 Dokumen**	**563.762.167**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi		1	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1 Dokumen	103.076.068	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		1324	1100 Pelaku Usaha	1150 Pelaku Usaha	129.499.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	1200 Pelaku Usaha	460.686.099	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA dan PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal**		**47**	**60**	**65%**	**160.555.950**					**DPMPTSP**	**70%**	**800.000.000**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.05.1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA yang Menyampaikan LKPM**			**965 Perusahaan**	**1173 Pelaku Usaha**	**160.555.950**					**DPMPTSP**	**1173 Pelaku Usaha**	**800.000.000**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		17	5 Kegiatan Usaha	7 Kegiatan Usaha	134.849.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	9 Kegiatan Usaha	222.383.175	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		6	6	6 Kegiatan Usaha	24.710.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	6 Kegiatan Usaha	120.280.368	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Renja 2027 DPMPTSP (Lanjutan)

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		378	120	120 Pelaku Usaha	996.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	420 Pelaku Usaha	457.336.437	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
	2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**		**90**	**92**	**93%**	**123.095.000**					**DPMPTSP**	**93%**	**450.000.000**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.06.1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi PMA dan PMDN**		**2 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**123.095.000**					**DPMPTSP**	**3 Dokumen**	**450.000.000**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah**
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		3	3	3 Dokumen	123.095.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU			DPMPTSP	3 Dokumen	450.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam menjalankan tugas pokok, maka harus dilakukan sinkronisasi menyangkut indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, agar tetap mengacu pada Renstra dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. Sinkronisasi memastikan bahwa proses penyelarasan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dengan ukuran keberhasilan yang terukur. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua kegiatan dan program yang direncanakan dalam Renstra berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis organisasi.

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, yang berfungsi sebagai pedoman monitoring, evaluasi dan pengawasan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra dan RPJMD disajikan pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	Investor (Proyek)	1.520	Sumber Data : Olahan data dari OSS yang disampaikan lewat Press Release Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM RI secara periodik
		Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA)	Rp Juta	96.237.250	
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	4.155	
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/ Perusahaan)	Orang/ Perusahaan	17	

Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. Indikator pertama, **Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)** dengan target tahun 2027 sebesar 1.520 Proyek, indikator ini dihitung berdasarkan jumlah proyek PMDN/PMA kategori Non UMK yang berinvestasi di wilayah Sulawesi

tengah. Indikator kedua, **Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)** dengan target Tahun 2027 sebesar 96.237.250 Juta Rupiah (*baca: 96,2 Triliun Rupiah*), indikator ini dihitung berdasarkan realisasi nilai investasi dari perusahaan PMDN/PMA di wilayah Sulawesi tengah. Indikator ketiga, **Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN** dengan target Tahun 2027 sebesar 4.155 Milyar Rupiah (*baca: 4,155 Triliun Rupiah*), indikator ini dihitung berdasarkan nilai realisasi investasi dari perusahaan PMDN di wilayah Sulawesi tengah. Indikator keempat, **Rasio Daya Serap Tenaga Kerja** dengan target Tahun 2027 sebesar 17 Orang/Perusahaan, indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang berinvestasi di wilayah Sulawesi tengah.

Penetapan target 2027 jauh lebih rendah dari target Renstra 2025-2029 serta masih lebih rendah dari capaian tahun 2025 karena mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi terkini dunia investasi di Indonesia dan stock investasi di Sulawesi Tengah, serta mempertimbangkan juga estimasi prognosis target dari BKPM. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi penyesuaian target antara lain :

- Perubahan Regulasi; Moratorium pada PP 28 tahun 2025 secara resmi mengatur pengetatan dan penghentian sementara investasi smelter nikel baru untuk produk antara, seperti Nickel Pig Iron (NPI), Feronickel (FENI), Nickel Matte, dan Mixed HydroxidePrecipitate (MHP), dimana Investasi Sulawesi tengah masih sangat bertumpu pada produk nikel tersebut;

- Faktor Geopolitik Global; Konflik Timur Tengah (seperti ketegangan antara Iran, AS, dasn Israel), perang yang terus berlanjut, dan persaingan dagang AS – Tiongkok adalah faktor geopolitik utama. Hal ini memicu ketidakpastian tinggi, gangguan rantai pasok global, lonjakan inflasi, dan fluktuasi harga komoditas /energy, yang membuat investor lebih berhati – hati atau menunda realisasi investasi.

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP

Indikator Kinerja Kunci (IKK) mengukur keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan dalam hal ini IKK memberikan Gambaran jelas sejauh mana tujuan dan sasaran strategis telah tercapai.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra dan RPJMD disajikan pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET 2027	KET
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	Persentase	100	Sumber Data : Olahan data dari OSS yang disampaikan lewat Press Release Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM RI secara periodik

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 yaitu **Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi** dengan target Tahun 2027 sebesar 100%. Indikator ini dihitung berdasarkan persentase perbandingan jumlah capaian realisasi investasi PMDN/PMA tahun berjalan dengan target realisasi investasi PMDN/PMA tahun berjalan di wilayah Sulawesi Tengah.

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027. Tentu saja keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf.

Rencana Kerja ini telah diupayakan agar memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini nantinya membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian dokumen perencanaan ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta mengacu pada misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 ini menjadi acuan kerja bagi unit-unit pelaksana dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing. Untuk itu semua unit kerja baik Kesekretariatan maupun Tim Kerja Teknis harus melaksanakan tugas dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.